



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK

<https://jurnal.uinsssc.ac.id/index.php/equalita>

Published by Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas LP2M
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Analisis Fenomena Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan: Studi Kasus Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024

Wahyu Risti Bunga Nadia¹, Ane Permatasari²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

² Pusat Studi SDG's Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan terjadinya pernikahan dini serta implikasinya terhadap kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Karanganyar pada periode 2021–2024. Subjek penelitian mencakup perempuan yang menikah di usia muda, pihak keluarga, serta perwakilan instansi terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor emosional, budaya, agama, dan tekanan ekonomi menjadi pendorong utama pernikahan dini. Praktik ini berdampak pada terhentinya pendidikan formal, terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan, serta meningkatnya ketergantungan finansial pada pasangan. Minimnya akses terhadap program pemberdayaan dan lemahnya koordinasi lintas instansi memperburuk kondisi tersebut, sehingga perempuan yang menikah dini sulit mencapai kemandirian ekonomi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan program pendewasaan usia perkawinan, pemberian akses pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha, serta sinergi antarinstansi untuk memutus lingkaran kerentanan sosial-ekonomi akibat pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan dini; kemandirian ekonomi; pendidikan; pemberdayaan perempuan.

ABSTRACT: This study aims to analyze the reasons behind early marriage and its implications for women's economic independence in Karanganyar Regency during the 2021–2024 period. The research subjects include young married women, their families, and representatives of relevant local institutions. The study employed a qualitative descriptive method with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that emotional factors, cultural traditions, religious values, and economic pressures are the main drivers of early marriage. Such practices negatively affect women by interrupting formal education, limiting access to employment, and increasing financial dependence on their spouses. The lack of access to empowerment programs and weak cross-sectoral coordination further exacerbate the situation, making it difficult for women to achieve economic independence. The study recommends strengthening the program for delaying the age of marriage, providing skills training and business capital support, as well as enhancing institutional collaboration to break the cycle of social and economic vulnerability caused by early marriage.

Keywords: Early marriage; economic independence; education; women's empowerment.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang terus bertahan di berbagai lapisan masyarakat, terutama di negara berkembang. Praktik ini membawa dampak serius pada kehidupan perempuan karena dilakukan ketika mereka belum matang secara fisik, mental, maupun emosional. Perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun umumnya belum memiliki kesiapan untuk mengemban tanggung jawab sebagai istri dan ibu, termasuk dalam mengelola rumah tangga maupun menghadapi tekanan sosial yang muncul setelah berumah tangga (Anggreni et al., 2023). Situasi tersebut membatasi ruang gerak perempuan dalam mengembangkan kapasitas diri, baik di bidang pendidikan, keterampilan, maupun kesempatan bekerja. Pada akhirnya, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga pada kualitas generasi yang dilahirkan.

Salah satu konsekuensi yang paling nyata dari pernikahan dini adalah terputusnya jalur pendidikan perempuan. Banyak remaja perempuan terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena desakan menikah, padahal pendidikan merupakan fondasi penting untuk membangun kemandirian di masa depan. Tanpa pendidikan yang cukup, peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak menjadi terbatas, sehingga perempuan cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, ketiadaan akses pendidikan juga mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh keterampilan finansial maupun sosial yang dibutuhkan agar dapat mandiri secara ekonomi (Pandey, 2024). Dalam kondisi ini, perempuan muda sering bergantung sepenuhnya pada suami atau keluarga besar, sehingga kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan sosial semakin tinggi.

Ketidakmampuan perempuan dalam mengakses pendidikan formal juga berdampak pada keterbatasan pilihan pekerjaan. Mereka yang menikah di usia belia lebih banyak terserap pada sektor informal dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak stabil. Minimnya keterampilan membuat mereka kesulitan berkompetisi di pasar tenaga kerja, sehingga peluang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi sangat terbatas (Wahhaj, 2018). Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah muda bergantung pada suami secara penuh. Jika terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau ditinggal pasangan karena kematian, perempuan tersebut rentan mengalami krisis ekonomi yang mendalam dan sering kali terjerumus ke dalam kemiskinan struktural yang sulit diputus (Nelson, 2019).

Dalam skala global, Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. UNICEF mencatat lebih dari 25 juta kasus pernikahan anak di Indonesia,

menempatkan negara ini di posisi keempat setelah India, Bangladesh, dan Nigeria (UNICEF, 2020). Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan meskipun angka pernikahan anak mengalami tren penurunan dari 11,2% pada 2018 menjadi 8,7% pada 2023, angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan penghapusan pernikahan anak (UNICEF, 2024). Perlambatan laju penurunan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih konsisten, baik berupa revisi undang-undang perkawinan maupun kampanye kesadaran publik yang lebih masif, untuk menekan angka pernikahan dini secara signifikan.

Kondisi di tingkat lokal memperlihatkan tantangan yang lebih konkret. Kabupaten Karanganyar, misalnya, masih menghadapi angka pernikahan dini yang cukup tinggi dengan rata-rata lebih dari 200 kasus per tahun. Bahkan pada 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 230 kasus, menandakan adanya hambatan dalam upaya menurunkan prevalensi pernikahan anak (Nabilla, 2024; Wardani, 2024). Tingginya angka ini memperlihatkan bahwa intervensi dari pemerintah pusat perlu diimbangi dengan kebijakan lokal yang responsif terhadap karakteristik masyarakat setempat. Salah satu langkah strategis adalah pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menetapkan usia ideal menikah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dengan harapan pasangan telah lebih matang secara fisik, emosional, dan finansial (BKKBN, 2023). Upaya lain yang dijalankan di Kabupaten Karanganyar meliputi pembentukan Forum Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Sekolah Calon Pengantin, hingga kampung keluarga berkualitas. Program-program tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada remaja dan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kesiapan ekonomi sebelum berumah tangga (Iswadi, 2022).

Kajian literatur mengenai pernikahan dini di Indonesia menunjukkan beragam perspektif, mulai dari faktor penyebab hingga dampaknya. Kajian literatur mengenai pernikahan dini di Indonesia menunjukkan beragam perspektif, mulai dari faktor penyebab hingga dampaknya. Faktor ekonomi dan sosial terbukti menjadi pendorong utama, sementara pendidikan dan status pekerjaan kepala rumah tangga berperan penting dalam ketahanan remaja perempuan dari praktik ini (Adam, 2020; Sari & Sitorus, 2021). Dari sisi psikologis, kematangan emosi terbukti memengaruhi penyesuaian perkawinan, sedangkan pernikahan dini juga memiliki implikasi pada kesehatan reproduksi dan mental (Hayatnufus et al., 2019; Sari et al., 2020). Penelitian lain menyoroti aspek struktural, seperti literasi ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian

perempuan, status ekonomi perdesaan sebagai faktor kerentanan, serta dukungan keluarga yang dominan dalam menjaga stabilitas rumah tangga (Setyari et al., 2018; Wulandari & Laksono, 2020; Ernawati et al., 2021). Selain itu, dampak kesehatan dan sosial juga telah diteliti secara luas, sedangkan ekonomi dipandang sebagai pendorong sekaligus penyebab turunnya kesejahteraan dan munculnya stigma sosial (Nisa et al., 2022; Khaerani, 2019; Husnani & Soraya, 2020).

Meski memberikan gambaran yang kaya, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih terfragmentasi pada aspek penyebab, kesehatan, atau psikologi, serta jarang mengaitkan langsung praktik pernikahan dini dengan kemandirian ekonomi perempuan dalam konteks kebijakan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada dampak pernikahan dini terhadap kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Karanganyar, sekaligus mengevaluasi sejauh mana program dan intervensi pemerintah daerah mampu memutus lingkaran kerentanan ekonomi yang ditimbulkan.

Dukungan lintas sektor yang melibatkan keluarga, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, hingga institusi pendidikan sangat diperlukan agar pesan mengenai risiko pernikahan anak lebih merata diterima. Dengan keterlibatan yang luas, diharapkan muncul perubahan budaya yang mendukung penundaan usia pernikahan sekaligus mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan lebih lama, meningkatkan keterampilan, dan membangun kemandirian ekonomi. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis dampak pernikahan dini terhadap kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Karanganyar, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan lokal dapat menekan dampak negatif dari praktik tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai praktik pernikahan dini dan kaitannya dengan kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Karanganyar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif, perspektif, serta makna yang dirasakan langsung oleh perempuan yang menikah pada usia muda, yang sulit ditangkap melalui metode kuantitatif (Neuman, 2020). Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yakni data primer berupa wawancara mendalam dengan informan kunci seperti perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perempuan pelaku pernikahan dini, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemerintah, publikasi akademik, dan artikel berita yang relevan (Ajayi,

2023). Kabupaten Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena prevalensi kasus pernikahan dini di wilayah ini masih tinggi, sehingga memberikan konteks sosial yang tepat untuk menganalisis isu yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai rangkaian tahapan operasional yang memadukan dua sumber, yakni data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terarah yang digunakan untuk menangkap pengalaman, praktik, dan konteks sosial-ekonomi perempuan yang menikah dini di Kabupaten Karanganyar, serta data sekunder melalui telaah dokumentasi berupa statistik resmi, regulasi, dan program lokal terkait pendewasaan usia perkawinan dari Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih terpercaya dan memiliki konteks yang utuh (Cresswell & Cresswell, 2020). Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Melalui model ini, tema-tema utama dapat diidentifikasi dan dimaknai secara sistematis dalam konteks lokal Kabupaten Karanganyar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Dini dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang berkelindan dengan dinamika budaya, agama, dan ekonomi, serta berdampak pada konfigurasi kesejahteraan keluarga, terlebih pada lingkup Kabupaten Karanganyar. Dalam konteks ini, keputusan menikah pada usia muda tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk oleh interaksi nilai, norma, dan kondisi material yang memengaruhi cara keluarga dan komunitas memaknai transisi menuju dewasa.

Alasan di balik keputusan menikah pada usia muda di Kabupaten Karanganyar menunjukkan keragaman faktor yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, agama, maupun ekonomi. Sebagian responden menyebutkan bahwa rasa kecocokan dengan pasangan dan dukungan finansial keluarga yang memadai mendorong mereka untuk segera menikah meski usia masih muda. Faktor emosional ini kerap dipandang cukup kuat sebagai dasar untuk membangun rumah tangga, walaupun kesiapan mental dan kematangan psikologis masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan yang

menegaskan bahwa keputusan menikah dini sering kali lebih didorong oleh keyakinan subjektif ketimbang pertimbangan rasional jangka panjang (Anggraeni, 2023).

Di sisi lain, pengaruh budaya dan tradisi juga memiliki peran dominan. Dalam beberapa keluarga, menikah di usia belia dianggap wajar bahkan diharapkan, sehingga individu merasa terdorong untuk mengikuti pola yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Norma sosial semacam ini memunculkan tekanan moral yang membuat penundaan pernikahan menjadi kurang lazim. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya sering lebih kuat dibandingkan pertimbangan pendidikan atau ekonomi dalam memengaruhi keputusan menikah dini (Adam, 2020). Dengan demikian, tradisi yang mengakar dapat memperkuat praktik pernikahan muda meski kondisi finansial keluarga tidak selalu mendukung.

Selain faktor emosional dan budaya, alasan religius juga muncul sebagai justifikasi menikah dini. Bagi sebagian responden, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah sekaligus cara untuk menghindari hubungan pacaran yang berkepanjangan. Keyakinan agama ini membuat mereka lebih mantap untuk menikah meskipun masih berusia dini, terlebih jika didukung oleh kondisi ekonomi keluarga yang relatif stabil. Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa keputusan menikah muda tidak hanya berakar pada pertimbangan sosial, melainkan juga pada interpretasi nilai-nilai agama yang diyakini sebagai pedoman hidup. Hal ini senada dengan temuan yang menggarisbawahi pengaruh nilai religius terhadap praktik pernikahan anak perempuan di pedesaan (Husnani & Soraya, 2020).

Meskipun demikian, tidak semua pernikahan dini terjadi karena kesiapan emosional, tradisi, atau nilai agama. Sebagian kasus justru dipicu oleh kehamilan di luar nikah yang memaksa pasangan menikah sebelum siap secara ekonomi maupun psikologis. Situasi ini menambah beban orang tua karena pasangan muda biasanya belum bekerja dan masih bergantung pada keluarga besar. Ketidakmatangan dalam mengelola rumah tangga pada akhirnya memperbesar risiko munculnya masalah sosial dan ekonomi, serta mempersempit akses perempuan untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja. Temuan ini sejalan dengan studi yang menekankan bahwa pernikahan dini sering kali berimplikasi pada kerentanan ekonomi, kesehatan reproduksi, dan keterbatasan peran sosial perempuan di kemudian hari (Nisa et al., 2022). Lebih lanjut temuan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 1. Temuan Penelitian Pernikahan Dini dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga
Sumber: Dikelola oleh Peneliti (2025)

Faktor Utama	Deskripsi Temuan Lapangan
Faktor Emosional & Kecocokan Pasangan	Responden menikah muda karena merasa sudah cocok dengan pasangan; adanya dukungan finansial keluarga membuat mereka merasa cukup siap walaupun secara psikologis belum matang.
Budaya & Tradisi	Norma sosial menempatkan menikah muda sebagai hal yang wajar bahkan diharapkan; adanya tekanan moral membuat penundaan pernikahan kurang lazim.
Faktor Religius	Pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus cara menghindari pacaran berkepanjangan; keputusan menikah dini lebih mantap bila ekonomi keluarga relatif stabil.
Kehamilan di Luar Nikah	Sebagian pasangan menikah karena kehamilan yang tidak direncanakan; biasanya belum siap ekonomi dan psikologis sehingga masih bergantung pada keluarga besar.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan. Faktor emosional seperti perasaan cocok dengan pasangan serta adanya dukungan finansial keluarga mendorong pasangan untuk menikah muda meskipun belum matang secara psikologis. Selain itu, budaya dan tradisi yang mengakar menempatkan menikah di usia belia sebagai hal wajar dan bahkan diharapkan, sehingga tekanan sosial membuat penundaan pernikahan menjadi kurang lazim. Alasan religius juga memperkuat keputusan menikah dini dengan pandangan bahwa pernikahan merupakan ibadah sekaligus cara menghindari hubungan pacaran panjang. Di sisi lain, sebagian kasus terjadi karena kehamilan di luar nikah yang memaksa pasangan menikah tanpa kesiapan ekonomi maupun psikologis, sehingga berimplikasi pada ketergantungan kepada keluarga besar.

B. Dampak Pernikahan Dini terhadap Akses Pendidikan dan Karier

Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan karier berkelindan dengan akumulasi modal manusia, pembagian peran domestik, serta kapasitas ekonomi rumah tangga, sehingga peluang mobilitas sosial perempuan cenderung menyempit, terlebih pada konteks lokal Kabupaten Karanganyar yang masih dipengaruhi norma keluarga dan komunitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pernikahan dini memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Sebagian responden menyatakan bahwa setelah menikah, prioritas utama beralih pada urusan keluarga, sehingga kesempatan untuk melanjutkan kuliah praktis tertutup. Tanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak membatasi waktu, energi, dan mobilitas, membuat akses pendidikan lebih tinggi menjadi semakin sulit. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan finansial karena banyak pasangan muda masih bergantung pada penghasilan suami dengan pendapatan

rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan dari keluarga dengan status ekonomi rendah lebih rentan mengalami pernikahan dini sekaligus terhambat akses pendidikannya (Wulandari & Laksono, 2020).

Selain pendidikan, pernikahan dini juga berdampak pada karier. Banyak perempuan yang menikah di usia muda akhirnya berfokus menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, sehingga kesempatan untuk bekerja di sektor formal semakin kecil. Latar belakang pendidikan yang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) membuat mereka kesulitan memasuki pasar kerja yang menuntut keterampilan khusus. Akibatnya, mereka lebih sering berada dalam lingkaran ketergantungan ekonomi terhadap pasangan. Kondisi ini mencerminkan temuan yang menyatakan bahwa perempuan pelaku pernikahan dini umumnya masih bergantung pada dukungan finansial keluarga, bukan pada kemandirian ekonomi mereka sendiri (Ernawati et al., 2021).

Meski mayoritas responden mengalami hambatan pendidikan dan karier, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya dukungan positif dari keluarga. Ada perempuan yang tetap dapat melanjutkan pendidikan setelah menikah karena dorongan kuat dari orang tua dan pasangan, serta kondisi finansial yang stabil. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya dukungan sosial dan akses sumber daya yang memadai, pernikahan dini tidak selalu mengakhiri peluang pendidikan. Namun, fenomena ini jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan mayoritas kasus di lapangan. Dalam konteks ini, sebuah penelitian mendukung pentingnya program literasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka tetap dapat mengembangkan potensi meskipun menikah pada usia muda (Setyari et al., 2018).

Dari sisi pekerjaan, sebagian kecil pasangan muda memilih untuk berwirausaha setelah menikah. Langkah ini membuka ruang bagi perempuan untuk tetap berkontribusi pada ekonomi keluarga meskipun pendidikan formal mereka terbatas. Namun, wirausaha juga menuntut modal, keberanian, serta kesiapan menghadapi risiko yang tinggi. Sementara itu, sebagian besar lainnya tidak bekerja sama sekali dan hanya mengurus rumah tangga, memperkuat norma tradisional yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Situasi ini menimbulkan ketidaksetaraan gender di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan dalam pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan pandangan ICRW (2023) bahwa pernikahan dini bukan hanya menghambat individu, tetapi juga mengurangi produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Secara lebih lanjut temuan penelitian pada bagian ini menunjukkan:

Tabel 2. Temuan Penelitian Dampak Pernikahan Dini terhadap Akses Pendidikan dan Karier, Sumber: Dikelola oleh Peneliti (2025)

Dampak	Deskripsi Temuan Lapangan
Akses Pendidikan Terhambat	Setelah menikah, prioritas bergeser ke rumah tangga dan anak; keterbatasan waktu, energi, dan biaya membuat kuliah sulit dilanjutkan.
Karier Terhambat	Mayoritas perempuan menjadi ibu rumah tangga penuh; pendidikan rendah (SMP/SMA) menyulitkan masuk ke pasar kerja formal; ketergantungan ekonomi tinggi pada suami.
Dukungan Positif Keluarga	Sebagian kecil tetap melanjutkan pendidikan berkat dorongan orang tua/pasangan dan kondisi finansial stabil; fenomena ini jarang terjadi.
Alternatif Wirausaha	Beberapa pasangan memilih membuka usaha setelah menikah; peluang untuk kontribusi ekonomi ada, tetapi terbatas oleh modal dan risiko.

Tabel berikut menunjukkan jika dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan karier perempuan. Mayoritas responden menyatakan akses pendidikan mereka terhambat setelah menikah karena prioritas bergeser pada keluarga dan anak, ditambah dengan keterbatasan waktu, energi, serta biaya. Dampak serupa juga dirasakan pada aspek karier, di mana sebagian besar perempuan berhenti pada peran domestik sehingga sulit memasuki pasar kerja formal akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Meski demikian, terdapat sedikit kasus yang menunjukkan perempuan tetap dapat melanjutkan pendidikan berkat dukungan keluarga dan kondisi finansial yang stabil. Sebagian pasangan muda juga berupaya berwirausaha untuk menambah penghasilan, namun jumlahnya terbatas karena membutuhkan modal dan keberanian menghadapi risiko, sehingga ketimpangan peran perempuan dalam pendidikan dan ketenagakerjaan tetap dominan.

C. Kondisi Ekonomi dan Ketergantungan Finansial dalam Rumah Tangga

Kondisi ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas kehidupan keluarga setelah pernikahan. Dalam konteks pernikahan dini, kestabilan ekonomi menjadi isu yang krusial karena pasangan umumnya belum memiliki pekerjaan tetap, keterampilan memadai, maupun perencanaan keuangan yang matang. Perempuan yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sering kali bergantung pada pendapatan pasangan. Situasi ini tidak hanya memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berimplikasi pada tingkat kemandirian perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi perempuan yang menikah di usia muda di Kabupaten Karanganyar sangat beragam. Sekitar 20% responden menyatakan merasa cukup secara finansial sejak awal pernikahan, didukung penghasilan yang stabil atau

tabungan yang disiapkan sebelumnya. Sementara itu, mayoritas (80%) responden justru menghadapi keterbatasan ekonomi sejak awal rumah tangga mereka. Perasaan cukup ini bukan hanya soal jumlah pendapatan, melainkan bagaimana pasangan mampu menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan ekonomi mereka. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan yang seimbang dapat menciptakan rasa aman dalam rumah tangga, meskipun usia perkawinan masih relatif muda. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesiapan finansial sebelum menikah menjadi salah satu faktor penentu kestabilan ekonomi pasca pernikahan.

Namun, tidak sedikit pula yang menghadapi kesulitan ekonomi sejak awal berumah tangga. Penghasilan suami yang terbatas dan sering kali tidak menentu membuat keluarga muda harus berhemat secara ketat, menunda kebutuhan sekunder, dan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Pola penghematan ini memang membantu menjaga keberlangsungan rumah tangga, tetapi tidak mampu sepenuhnya menutup kerentanan finansial. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda cenderung lebih rentan terhadap instabilitas ekonomi karena belum memiliki pendapatan mapan maupun keterampilan kerja yang memadai (Wahhaj, 2018).

Keterbatasan literasi keuangan juga menjadi hambatan dalam menjaga kestabilan ekonomi. Beberapa responden mengaku tidak memiliki rencana keuangan jelas di awal pernikahan, sehingga sering kewalahan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Baru setelah mengalami kesulitan, mereka mulai belajar membuat anggaran bulanan dan mencatat pengeluaran. Praktik sederhana ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan merupakan keterampilan penting yang sering kali terabaikan dalam rumah tangga muda. Kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan menambah kerentanan ekonomi, apalagi jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan.

Selain itu, mayoritas perempuan yang menikah dini menunjukkan ketergantungan penuh pada suami sebagai pencari nafkah utama. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki ruang untuk mandiri secara finansial, sehingga daya tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga juga berkurang. Ketergantungan finansial yang tinggi memperbesar risiko ketika suami kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, atau menghadapi kondisi darurat. Hanya sebagian kecil perempuan yang tetap bekerja atau memiliki usaha kecil, yang memungkinkan mereka berkontribusi terhadap ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan. Temuan ini menguatkan pandangan penelitian yang menyatakan bahwa

kemandirian ekonomi perempuan yang menikah muda sangat dipengaruhi oleh akses pada pekerjaan atau usaha produktif yang bisa menopang pendapatan rumah tangga (Ernawati, 2021).

Tabel 3. Temuan Penelitian Kondisi Ekonomi dan Ketergantungan Finansial dalam Rumah Tangga, Sumber: Dikelola oleh Peneliti (2025)

Aspek	Deskripsi Temuan Lapangan
Kesiapan Finansial Awal	Ada pasangan yang merasa cukup karena memiliki penghasilan stabil atau tabungan sebelum menikah, serta mampu menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi ekonomi.
Kesulitan Ekonomi	Banyak pasangan menghadapi penghasilan terbatas dan tidak menentu, sehingga harus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
Literasi Keuangan Rendah	Sebagian responden tidak memiliki perencanaan keuangan jelas; baru belajar membuat anggaran setelah mengalami kesulitan.
Ketergantungan pada Suami	Mayoritas perempuan bergantung penuh pada penghasilan suami; hanya sebagian kecil yang bekerja atau memiliki usaha kecil untuk membantu ekonomi keluarga.

Temuan ini memperlihatkan variasi kondisi ekonomi perempuan yang menikah dini di Kabupaten Karanganyar. Sebagian kecil pasangan memiliki kesiapan finansial sejak awal, baik melalui tabungan maupun pendapatan stabil, namun mayoritas menghadapi keterbatasan ekonomi karena penghasilan suami yang rendah dan tidak menentu. Hambatan lain muncul dari literasi keuangan yang masih rendah, di mana sebagian besar belum terbiasa menyusun anggaran rumah tangga sehingga mudah kewalahan saat menghadapi kebutuhan mendesak. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan penuh pada suami sebagai pencari nafkah utama, yang membuat perempuan kurang memiliki kemandirian ekonomi.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi pada dasarnya menuntut adanya akses terhadap sumber daya, keterampilan, serta lingkungan sosial yang mendukung. Bagi perempuan yang menikah di usia dini, pencapaian kemandirian ini tidak selalu mudah karena terbentur berbagai keterbatasan struktural maupun personal. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengalaman kerja, hingga beban domestik yang besar membuat ruang gerak perempuan semakin sempit dalam mengembangkan kapasitas ekonomi. Hambatan tersebut bukan hanya memperlambat proses pemberdayaan, tetapi juga memperkuat ketergantungan pada pasangan, sehingga posisi tawar perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat menjadi lebih lemah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi perempuan menikah dini dalam mencapai kemandirian ekonomi adalah keterbatasan modal. Banyak responden

memiliki niat dan gagasan untuk membuka usaha, tetapi ketiadaan dana membuat rencana tersebut sulit direalisasikan. Keterbatasan ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus: penghasilan rendah membuat tabungan sulit terkumpul, sementara tanpa modal usaha, peluang untuk menambah penghasilan juga sangat kecil. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa modal merupakan faktor penentu utama dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah (Setyari, 2018).

Selain modal, waktu menjadi hambatan signifikan. Sebagian besar perempuan menikah dini harus mengurus rumah tangga dan anak secara penuh, sehingga hampir tidak ada kesempatan untuk mengembangkan usaha atau mencari pekerjaan tambahan. Beban domestik yang besar ini menyita tenaga dan pikiran, sehingga menghalangi mereka untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi produktif. Fenomena ini menyoroti bahwa beban domestik yang tidak seimbang membuat perempuan sulit mengakses peluang ekonomi, sekaligus memperparah ketidaksetaraan gender (Tarigan & Rosyada, 2021).

Kendala lain berasal dari lingkungan sosial dan budaya. Ada keluarga atau pasangan yang membatasi ruang perempuan untuk bekerja di luar rumah atau mengembangkan usaha sendiri, karena masih melekatnya pandangan tradisional mengenai peran perempuan. Meskipun ada juga yang mendapat dukungan moral penuh dari suami maupun keluarga, dukungan ini sering tidak diikuti dengan bantuan nyata berupa akses modal, pelatihan keterampilan, atau jaringan usaha. Dukungan emosional memang meningkatkan rasa percaya diri, tetapi tanpa langkah konkret, peluang untuk mandiri tetap terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan struktural di tingkat sosial masih menjadi penghalang besar bagi perempuan menikah muda di Karanganyar.

Menariknya, ada pula perempuan yang tidak merasa menghadapi tantangan besar karena kondisi ekonomi keluarga sudah relatif stabil. Sebagian di antaranya memiliki pengalaman kerja sebelum menikah atau membuka usaha bersama pasangan sehingga tekanan finansial lebih ringan. Meskipun begitu, kasus ini masih tergolong minoritas dibandingkan dengan mayoritas responden yang bergantung sepenuhnya pada pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam mencapai kemandirian ekonomi pasca pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh modal awal, dukungan keluarga, dan pembagian peran rumah tangga. Tanpa faktor-faktor tersebut, perempuan menikah dini cenderung terjebak dalam

pola ketergantungan finansial yang sulit diputus, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup keluarga maupun pembangunan ekonomi lokal.

Tabel 4. Temuan Penelitian Tantangan dan Hambatan dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi, Sumber: Dikelola oleh Peneliti (2025)

Hambatan	Deskripsi Temuan Lapangan
Keterbatasan Modal	Banyak perempuan memiliki keinginan membuka usaha, tetapi tidak dapat merealisasikan karena kekurangan dana.
Beban Domestik	Tugas mengurus rumah tangga dan anak menyita waktu, membuat perempuan sulit mengembangkan usaha atau bekerja.
Kendala Sosial-Budaya	Lingkungan sosial dan keluarga sering membatasi ruang gerak perempuan untuk bekerja atau berwirausaha.
Kasus Minoritas Ekonomi Stabil	Ada sebagian kecil perempuan yang tidak menghadapi tantangan besar karena memiliki usaha atau pengalaman kerja sebelumnya.

Tabel 4 menegaskan bahwa tantangan utama perempuan menikah dini dalam mencapai kemandirian ekonomi adalah keterbatasan modal dan besarnya beban domestik. Ketiadaan dana membuat banyak rencana usaha tidak terlaksana, sementara kewajiban rumah tangga yang berat membatasi waktu untuk kegiatan produktif. Hambatan juga bersumber dari faktor sosial dan budaya, seperti adanya pandangan tradisional yang menghalangi perempuan bekerja di luar rumah. Meskipun ada sebagian kecil kasus yang menunjukkan stabilitas ekonomi karena pengalaman kerja atau usaha bersama pasangan, jumlahnya masih minoritas, sehingga mayoritas perempuan tetap menghadapi hambatan besar dalam mencapai kemandirian.

E. Akses terhadap Program Pemberdayaan Perempuan dan Dukungan Pemerintah

Program pemberdayaan perempuan pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Kehadiran program semacam ini sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan yang menikah di usia dini, karena dapat membuka peluang untuk memperoleh pelatihan, modal usaha, maupun dukungan psikososial yang menunjang kemandirian. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada seberapa jauh kebijakan mampu menjangkau kelompok sasaran dan sejauh mana koordinasi lintas sektor dijalankan secara konsisten. Tanpa adanya distribusi yang merata dan akses yang inklusif, program pemberdayaan berpotensi hanya menjadi wacana kebijakan tanpa dampak nyata di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini di Kabupaten Karanganyar hampir seluruhnya tidak pernah berpartisipasi dalam program pemberdayaan ataupun pelatihan keterampilan. Fakta ini menegaskan adanya kesenjangan serius antara

kebijakan yang dirancang dengan realitas di lapangan. Minimnya akses dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan jangkauan program ke daerah pedesaan, hingga absennya inisiatif pemerintah daerah dalam menyediakan kegiatan yang relevan bagi kelompok sasaran. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya distribusi dukungan, sehingga perempuan yang seharusnya menjadi target justru tidak tersentuh oleh program peningkatan kapasitas. Situasi ini sejalan dengan temuan yang menyebutkan bahwa kurangnya intervensi pemerintah memperkuat kerentanan ekonomi perempuan pelaku pernikahan dini (Husnani & Soraya, 2020).

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sejatinya dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan kesiapan individu sebelum menikah, baik dari sisi kesehatan reproduksi, kesiapan mental, maupun stabilitas ekonomi. Dengan menunda usia pernikahan hingga berada pada fase yang lebih matang, pasangan memiliki peluang lebih besar untuk membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya secara finansial. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi PUP di Karanganyar belum berjalan optimal, sehingga tujuan untuk memutus lingkaran kemiskinan melalui pencegahan pernikahan dini masih jauh dari harapan. Efektivitas program pencegahan hanya dapat tercapai jika dijalankan secara konsisten dan terintegrasi (Junaidi et al., 2020)

Kelemahan lain yang terlihat adalah ketiadaan kerja sama lintas sektor. DP3APPKB sebagai instansi terkait mengaku belum menjalin kolaborasi dengan sekolah, dinas ketenagakerjaan, atau lembaga lain yang sebenarnya dapat berperan besar dalam memperluas jangkauan pemberdayaan. Keterbatasan data juga memperburuk keadaan, karena pencatatan pernikahan dini lebih banyak dikelola Kementerian Agama, sementara DP3APPKB hanya bertugas menyebarluaskan informasi. Fragmentasi ini membuat koordinasi menjadi lemah, sehingga potensi sinergi dalam penanganan pernikahan dini maupun pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat diwujudkan secara maksimal.

Minimnya intervensi nyata pada akhirnya membuat perempuan yang menikah dini tidak memiliki ruang partisipasi maupun kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Tidak adanya program yang benar-benar terlaksana juga menjadikan mereka pasif, karena memang tidak tersedia wadah untuk terlibat. Padahal, jika program pemberdayaan berjalan optimal, perempuan bisa memperoleh bekal keterampilan kerja, akses modal usaha, hingga dukungan sosial yang dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada suami. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa ketiadaan program bukan hanya masalah teknis, tetapi

hambatan struktural yang berimplikasi langsung pada rendahnya kemandirian ekonomi perempuan di Karanganyar.

Tabel 2. Temuan Penelitian Akses terhadap Program Pemberdayaan Perempuan dan Dukungan Pemerintah, Sumber: Dikelola oleh Peneliti (2025)

Aspek	Deskripsi Temuan Lapangan
Minim Partisipasi Program	Hampir seluruh responden tidak pernah terlibat dalam program pemberdayaan atau pelatihan keterampilan.
Implementasi PUP Belum Optimal	Program pendewasaan usia perkawinan belum berjalan maksimal, sehingga tujuan menunda pernikahan dini sulit tercapai.
Kurangnya Kerja Sama Lintas Sektor	Koordinasi antarinstansi masih lemah, terutama dalam distribusi program, sosialisasi, dan pencatatan data pernikahan dini.
Tidak Tersedianya Wadah Partisipasi	Perempuan menikah dini tidak memiliki ruang nyata untuk mengembangkan keterampilan atau mengakses modal usaha.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa akses perempuan menikah dini terhadap program pemberdayaan dan dukungan pemerintah masih sangat minim. Mayoritas responden tidak pernah terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas karena kurangnya sosialisasi maupun jangkauan program ke pedesaan. Implementasi program penundaan usia perkawinan juga belum optimal, sementara koordinasi lintas sektor masih lemah sehingga potensi sinergi tidak terwujud. Akibatnya, perempuan yang menikah dini tidak memiliki wadah untuk mengembangkan keterampilan atau mengakses modal usaha, sehingga ketergantungan ekonomi pada suami semakin sulit diputus.

F. Harapan Masa Depan dan Refleksi terhadap Pernikahan Dini

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, banyak perempuan yang menikah dini tetap memiliki harapan untuk membangun kemandirian ekonomi di masa depan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber, sebagian dari mereka bercita-cita menabung dan membuka usaha kecil seperti toko atau bisnis rumahan. Aspirasi ini mencerminkan adanya kesadaran untuk beralih dari pola konsumsi jangka pendek menuju perencanaan keuangan jangka panjang. Pandangan tersebut juga menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi keterbatasan justru memunculkan tekad untuk mencari jalan keluar melalui usaha mandiri, meskipun dibutuhkan dukungan modal, keterampilan, dan lingkungan yang kondusif.

Selain keinginan berwirausaha, ada pula informan yang bercita-cita mencari pekerjaan tambahan yang fleksibel, seperti les privat atau pekerjaan berbasis rumah. Pilihan ini dipandang realistis karena tidak menuntut mobilitas tinggi dan dapat dijalankan bersamaan dengan peran domestik. Pendapatan tambahan yang diperoleh tidak hanya meringankan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang untuk menabung sebagai modal usaha

di kemudian hari. Hal ini memperlihatkan kemampuan adaptasi perempuan dalam mengelola keterbatasan, pentingnya literasi ekonomi dan inovasi untuk meningkatkan daya tahan finansial perempuan (Setyari, 2018).

Harapan untuk tetap berkarya meskipun menjadi ibu rumah tangga juga menjadi bagian dari refleksi mereka. Beberapa perempuan menyadari bahwa memiliki pendapatan pribadi penting untuk menjaga kemandirian, sekaligus mengurangi ketergantungan penuh pada suami. Pandangan ini menandakan adanya pergeseran cara pandang, di mana peran domestik tidak lagi dipandang sebagai penghalang mutlak untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga. Bahkan, ada yang memandang kemitraan ekonomi dengan suami di mana perempuan berperan sebagai pengelola keuangan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap stabilitas rumah tangga.

Refleksi yang muncul juga memperlihatkan kesadaran bahwa pernikahan dini membawa konsekuensi serius, terutama dalam hal pendidikan dan peluang kerja. Sebagian besar menyadari bahwa keterputusan pendidikan di usia muda membuat akses ke pekerjaan formal semakin terbatas. Hal ini memperkuat ketergantungan ekonomi pada pasangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi posisi tawar mereka di rumah tangga. Namun, mereka juga melihat bahwa dengan adanya program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan dukungan keluarga, perempuan yang menikah dini tetap memiliki peluang untuk membangun kemandirian finansial. Kesadaran ini menjadi modal penting untuk membentuk sikap resilien, sekaligus menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi struktural dari pemerintah maupun masyarakat agar harapan mereka dapat diwujudkan.

Tabel 3. Temuan Penelitian Harapan Masa Depan dan Refleksi terhadap Pernikahan Dini, Sumber: Dikelola oleh Peneliti (2025)

Aspek	Deskripsi Temuan Lapangan
Aspirasi Usaha Mandiri	Banyak perempuan bercita-cita menabung dan membuka usaha kecil seperti toko atau bisnis rumahan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Pekerjaan Fleksibel	Sebagian perempuan berharap bisa menjalani pekerjaan tambahan berbasis rumah, seperti les privat atau usaha kecil, agar tetap bisa menyeimbangkan peran domestik.
Peran dalam Ekonomi Rumah Tangga	Ada kesadaran bahwa pendapatan pribadi penting untuk mengurangi ketergantungan penuh pada suami; kontribusi bisa berupa pendapatan atau pengelolaan keuangan rumah tangga.
Refleksi atas Konsekuensi Pernikahan Dini	Perempuan menyadari dampak serius pernikahan dini terhadap pendidikan dan peluang kerja, namun tetap optimis bahwa dukungan keluarga dan program pemberdayaan dapat membuka jalan kemandirian.

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan, perempuan yang menikah dini tetap memiliki harapan untuk masa depan yang lebih mandiri. Aspirasi

mereka terwujud dalam rencana membuka usaha kecil maupun mencari pekerjaan fleksibel yang dapat dijalankan bersamaan dengan peran domestik. Selain itu, terdapat kesadaran baru mengenai pentingnya memiliki pendapatan pribadi atau berperan sebagai pengelola keuangan rumah tangga demi menjaga stabilitas ekonomi. Refleksi yang muncul juga memperlihatkan pemahaman bahwa pernikahan dini berdampak serius pada pendidikan dan akses kerja, namun dengan dukungan program pemberdayaan, keterampilan, dan lingkungan keluarga yang mendukung, peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi tetap terbuka.

G. Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021–2024

Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar pada periode 2021–2024 memperlihatkan dinamika yang tidak stabil. Data dari Kantor Kementerian Agama menunjukkan bahwa angka pernikahan dini sempat meningkat tajam pada 2021, menurun pada 2022, lalu kembali mengalami kenaikan pada 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah bersama lembaga terkait telah berupaya melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan, faktor pendorong seperti tradisi yang masih kuat, pengaruh keluarga besar, hingga tekanan ekonomi tetap mendominasi. Jika ditinjau dari teori pemberdayaan masyarakat, kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran kritis masyarakat dalam mengendalikan keputusan penting yang berhubungan dengan masa depan, sehingga proses pemberdayaan baik secara psikologis maupun sosial belum sepenuhnya berjalan efektif (Freire, 2020; Perkins & Zimmerman, 1995a).

Alasan di balik praktik pernikahan dini di Karanganyar beragam dan saling terkait. Sebagian remaja menikah karena dorongan perasaan pribadi, sebagian lain karena tradisi perjodohan atau anggapan bahwa menikah adalah simbol kedewasaan. Tidak jarang pula faktor ekonomi menjadi latar belakang, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan finansial yang melihat pernikahan sebagai cara untuk meringankan beban rumah tangga. Namun, ketika pernikahan berlangsung dalam kondisi ekonomi lemah, perempuan cenderung semakin bergantung secara finansial pada pasangan, yang justru menghambat tujuan pemberdayaan untuk menciptakan distribusi kekuasaan yang adil dalam mengelola sumber daya (Minkler & Wallerstein, 2012).

Dari sisi pendidikan, pernikahan dini sering berujung pada berhentinya sekolah bagi perempuan. Banyak dari mereka yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak. Hilangnya kesempatan belajar ini

berdampak pada keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, sehingga mempersempit peluang memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam kerangka teori pemberdayaan, pendidikan dipandang sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan diri dan memungkinkan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial serta pengambilan keputusan komunitas (Perkins & Zimmerman, 1995b). Dengan demikian, terputusnya pendidikan akibat pernikahan dini tidak hanya melemahkan posisi ekonomi perempuan, tetapi juga menutup ruang mereka dalam forum sosial yang lebih luas (Islamic Development Bank, 2021).

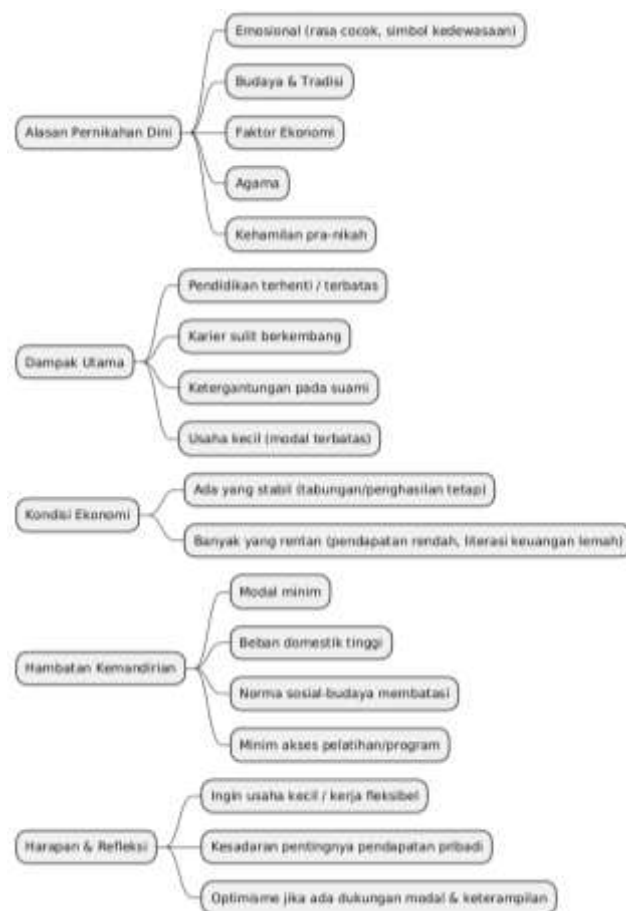
Keterbatasan pada bidang pendidikan turut memengaruhi akses pekerjaan. Sebagian besar perempuan yang menikah dini lebih memilih menjadi ibu rumah tangga penuh karena terbatasnya keterampilan dan modal usaha. Meski ada yang mencoba memulai bisnis kecil, berbagai hambatan seperti minimnya permodalan, kurangnya pelatihan, dan jaringan pemasaran yang sempit membuat usaha sulit berkembang. Teori pemberdayaan menegaskan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya sangat penting agar perempuan dapat mengelola kehidupannya secara mandiri (Zimmerman, 2012). Tanpa dukungan yang memadai, peluang mereka untuk mandiri secara ekonomi tetap sangat terbatas.

Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya akses terhadap program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga nonpemerintah di Karanganyar. Sebagian besar perempuan yang menikah dini mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan keterampilan, bantuan modal, ataupun pendampingan usaha. Koordinasi antarinstansi juga belum optimal, sehingga program pencegahan maupun pemberdayaan berjalan secara parsial. Padahal, teori pemberdayaan menekankan pentingnya dukungan struktural dan kerja sama lintas sektor agar perempuan memiliki kesempatan setara dalam mengembangkan kapasitas diri (Minkler & Wallerstein, 2012). Dengan memperkuat kolaborasi dan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya, perempuan yang menikah dini berpeluang besar meningkatkan kemandirian ekonomi dan berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak langsung pada ketahanan ekonomi keluarga dan rendahnya kemandirian perempuan. (Permatasari et al, 2025) menemukan bahwa kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan organisasi perempuan efektif memperkuat kapasitas ekonomi perempuan

melalui program berbasis komunitas. Pendapat (Prasetyo & Permatasari, 2021) juga menegaskan bahwa keadilan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup layak merupakan faktor utama penopang kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, (Permatasari et al, 2025) menunjukkan bahwa intervensi sosial berbasis ketahanan keluarga dan peningkatan keterampilan mampu mengurangi ketergantungan ekonomi serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan lokal. Temuan ini memperkuat bahwa rendahnya kapasitas ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan minimnya dukungan kelembagaan menjadi hambatan utama pemberdayaan perempuan pasca pernikahan dini.

Gambar 1. Temuan Penelitian Keseluruhan, Sumber: Dikelola oleh Peneliti (2025)



Bagan berikut juga menunjukkan temuan penelitian yang memperlihatkan keterhubungan antara **alasan** pernikahan dini, dampaknya, kondisi ekonomi rumah tangga, hambatan kemandirian, **hingga** harapan dan refleksi perempuan. Alasan pernikahan dini di Karanganyar masih banyak dipengaruhi faktor emosional, budaya, ekonomi, agama, maupun kehamilan pra-nikah. Kondisi ini berimplikasi pada terhentinya pendidikan, terbatasnya peluang karier, dan meningkatnya ketergantungan finansial pada suami,

meskipun sebagian mencoba usaha kecil. Dari sisi ekonomi, hanya sedikit keluarga yang stabil, sementara mayoritas rentan karena pendapatan rendah dan literasi keuangan yang lemah. Hambatan utama untuk mandiri adalah modal minim, beban domestik tinggi, norma sosial yang membatasi, serta minimnya akses pelatihan. Meski demikian, perempuan yang menikah dini tetap menyimpan harapan untuk membuka usaha kecil atau mencari kerja fleksibel, dengan kesadaran pentingnya memiliki pendapatan pribadi, serta optimisme bahwa dukungan modal dan keterampilan dapat membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi.

4. SIMPULAN

Bagan berikut juga menunjukkan temuan penelitian yang memperlihatkan keterhubungan antara **alasan** pernikahan dini, dampaknya, kondisi ekonomi rumah tangga, hambatan kemandirian, **hingga** harapan dan refleksi perempuan. Alasan pernikahan dini di Karanganyar masih banyak dipengaruhi faktor emosional, budaya, ekonomi, agama, maupun kehamilan pranikah. Kondisi ini berimplikasi pada terhentinya pendidikan, terbatasnya peluang karier, dan meningkatnya ketergantungan finansial pada suami, meskipun sebagian mencoba usaha kecil. Dari sisi ekonomi, hanya sedikit keluarga yang stabil, sementara mayoritas rentan karena pendapatan rendah dan literasi keuangan yang lemah. Hambatan utama untuk mandiri adalah modal minim, beban domestik tinggi, norma sosial yang membatasi, serta minimnya akses pelatihan. Meski demikian, perempuan yang menikah dini tetap menyimpan harapan untuk membuka usaha kecil atau mencari kerja fleksibel, dengan kesadaran pentingnya memiliki pendapatan pribadi, serta optimisme bahwa dukungan modal dan keterampilan dapat membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi.

Secara garis besar, Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy dapat dijadikan model pesantren yang modern dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender di lingkungan pendidikan agama Islam. Pesantren ini berhasil menyeimbangkan antara ajaran agama dan semangat keadilan sosial, sehingga mampu menciptakan generasi santri yang berpengetahuan luas, memiliki kepribadian Islami, dan mempunyai pemahaman gender yang menyeluruh.

REFERENSI

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Ajayi, V. O. (2023). A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data. *European Journal of Education and Pedagogy*, 2(3), 1–7. www.ej-

- edu.orgdoi:<http://dx.doi.org/19810.21091/>
- Anggraeni, A. (2023). *School Library Censorship: Perspectives of a School Librarian Association in Indonesia*. 49(3).
- Anggreni, D., Notobroto, H. B., & Soedirham, O. (2023). Determinants factors of early marriage in developing countries: a literature review. *Journal of Public Health in Africa*, 14(S2). <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2543>
- BKKBN. (2023). *Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Langkah Terencana Keluarga Berkualitas*.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/546967/pendewasaan-usia-perkawinan-pup-langkah-terencana-keluarga-berkualitas>
- Ernawati, H., Udah, A. F. M., Setiawan, F., & Isroin, L. (2021). Keputusan Menikah Dan Hubungannya Dengan Kemandirian Ekonomi Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Pedesaan. *Media Bina Ilmiah*, 16(4), 6781–6786.
<http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/10629>
- Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *The Community Performance Reader*.
<https://doi.org/10.4324/9781003060635-5>
- Hardiningrum, A., Shari, D., Rihlah, J., & Rulyansah, A. (2023). Seminar Parenting Tentang Keterlibatan Ayah Dalam Mengasuh Anak Usia Dini. *Indonesia Berdaya*, 5(1), 27–32. <https://doi.org/10.47679/ib.2024635>
- Husnani, R., & Soraya, D. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77.
<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- ICRW. (2023). *Child marriage factsheets*.
- Islamic Development Bank. (2021). The Economic Empowerment Approach (EEA) A New Paradigm for Development. *Economic Empowerment Department (EED)*, August, 17–29.
- Iswadi, A. (2022). *Pemkab Karanganyar Komitmen Turunkan Angka Kasus KDRT dan Pernikahan Usia Dini*. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Langkah Terencana Keluarga Berkualitas
- Minkler, M., & Wallerstein, N. (2012). Improving health through community organization and community building: Perspectives from health education and social work. *Community Organizing and Community Building for Health and Welfare: Third Edition*, 9780813553(January 2012), 37–58. <https://doi.org/10.36019/9780813553146-005>
- Nabilla, F. T. (2024). *Bikin Risau, Pernikahan Dini di Karanganyar Tembus 200 Kasus Per Tahunnya*. <https://solopos.espos.id/bikin-risau-pernikahan-dini-di-karanganyar-tembus-200-kasus-per-tahunnya-1887362>
- Nelson, M. K. (2019). The challenge of self-sufficiency. Women on welfare redefining independence. *Journal of Contemporary Ethnography*, 31(5), 582–614.
<https://doi.org/10.1177/089124102236543>
- Neuman, W. L. (2020). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Fourth). Allyn and Bacon. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Nisa, H. K., Ratrikaningtyas, P. D., & Ningsih, S. R. (2022). Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini pada Perempuan di Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(2), 89. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i2.475>
- Pandey, S. (2024). A Critical Examination of Women's Economic Independence. *SSRN Electronic Journal*, 15(2), 19–23. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4909110>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995a). Empowerment theory, research, and application.

- American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
<https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995b). Empowerment Theory, Research, and Application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
<https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Permatasari, A., Puspitosari, W. A., & Savitri, G. S. (2025). Ketahanan Keluarga Sebagai Intervensi Sosial Dalam Krisis Kesehatan Mental Anak Muda. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 6(2), 82–95. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v6i2.1008>
- Prasetyo, Y., & Permatasari, A. (2021). Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), LAYOUTING.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12544>
- Setyari, A. D., Husniah, F., & ... (2018). Peningkatan Kemandirian Ekonomi Perempuan Madura Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember melalui Kelompok Literasi Perempuan. *Proceedings of Annual ...*, 20–24.
<http://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/34>
- UNICEF. (2020). Child marriage. *Economic and Political Weekly*, 48(52), 5.
<https://doi.org/10.1177/104438942500600710>
- UNICEF. (2024). *Perkawinan Anak di Indonesia*.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>
- Wahhaj, Z. (2018). An Economic Model of Early Marriage. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 147–176.
- Wardani, I. S. (2024). *Karanganyar Hingga April 2024, Ada 40 Kasus Pernikahan Dini di Karanganyar*. <https://solopos.espos.id/hingga-april-2024-ada-40-kasus-pernikahan-dini-di-karanganyar-1922058>
- Wulandari, R. D., & Laksono, A. D. (2020). *Hubungan Status Ekonomi terhadap Pernikahan Dini pada Perempuan di Perdesaan Indonesia*. 12(1).
- Zimmerman, M. (2012). Empowerment Theory. *Handbook of Community Psychology*, October 2012. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6>